

BAB 2

LANDASAN TEORI

Pada bab ini diuraikan mengenai landasan teori variabel-variabel yang akan diteliti. Landasan teori yang akan dibahas meliputi pengertian inflasi, macam-macam inflasi, teori inflasi, efek inflasi, hubungan antara inflasi dengan jumlah uang beredar, dan hubungan antara inflasi dengan produk domestik bruto riil.

2.1 Pengertian Inflasi

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijumpai di hampir semua negara di dunia adalah inflasi. Definisi singkat inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Syarat adanya kecenderungan menaik yang terus-menerus juga perlu diingat. Kenaikan harga-harga karena, misalnya, musiman, menjelang hari-hari besar, atau yang terjadi sekali saja (dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan) tidak disebut inflasi. Kenaikan harga semacam ini tidak dianggap sebagai masalah atau “penyakit” ekonomi dan tidak memerlukan kebijakan khusus untuk menanggulangnya (Boediono, 1985:161).

Kenaikan harga dapat diukur dengan menggunakan indeks harga. Beberapa indikator yang digunakan oleh beberapa ahli untuk menggambarkan terjadinya inflasi di suatu negara antara lain :

1. Indeks biaya hidup (IBH)
2. Indeks harga konsumen (IHK)
3. Indeks harga perdagangan besar (IHPB)
4. GNP deflator

Indeks biaya hidup dan indeks harga konsumen secara umum hampir sama, yaitu untuk mengukur perkembangan daya beli atau pengeluaran untuk membeli sejumlah barang dan jasa oleh rumah tangga untuk keperluan hidup. Namun cakupan indeks harga konsumen cukup luas, barang dan jasa yang diukur lebih banyak dibandingkan indeks biaya hidup.

2.2 Macam-macam Inflasi

Ada berbagai macam untuk menggolongkan macam inflasi, dan penggolongan mana yang kita pilih tergantung tujuan kita.

2.2.1 Inflasi Menurut Asalnya

Penggolongan yang pertama berdasarkan asal dari inflasi. Disini kita bedakan :

- 1) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*).
- 2) Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*).

Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, panen yang gagal dan

sebagainya. Inflasi yang berasal dari luar negeri adalah inflasi yang timbul karena kenaikan harga-harga (yaitu, inflasi) di luar negeri atau di negara-negara langganan berdagang dengan negara kita. Kenaikan harga-harga yang kita impor mengakibatkan (1) secara langsung kenaikan indeks biaya hidup karena sebagian dari negara-negara yang tercakup di dalamnya berasal dari impor, (2) secara tidak langsung menaikkan indeks harga melalui kenaikan ongkos produksi (dan kemudian, harga jual) dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin-mesin yang harus di impor (*cost-inflation*), (3) secara tidak langsung menimbulkan kenaikan harga di dalam negeri karena ada kemungkinan (tetapi ini tidak harus demikian) kenaikan harga barang-barang impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah/swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga impor tersebut (*demand-inflation*).

“Penularan” inflasi dari luar negeri ke dalam negeri bisa pula lewat kenaikan harga barang-barang ekspor, dan saluran-salurannya hanya sedikit berbeda dengan penularan lewat kenaikan harga barang-barang impor. (1) Bila harga barang-barang ekspor (seperti kopi, teh) naik, maka indeks biaya hidup akan naik pula sebab barang-barang ini langsung masuk dalam daftar barang-barang yang tercakup dalam indeks harga. (2) Bila harga barang-barang ekspor (seperti kayu, karet, timah dan sebagainya) naik, maka ongkos produksi dari barang-barang yang menggunakan barang-barang tersebut dalam proses produksinya (perumahan, sepatu, kaleng dan sebagainya) akan naik, dan kemudian harga jualnya akan naik pula (*cost-inflation*). (3) Kenaikan harga barang-barang ekspor berarti kenaikan penghasilan eksportir (dan juga para produsen barang-barang

ekspor tersebut) naik. Kenaikan penghasilan ini kemudian akan dibelanjakan untuk membeli barang-barang (baik dari dalam maupun luar negeri). Bila jumlah barang yang tersedia di pasar tidak bertambah, akibatnya harga-harga barang lain akan naik pula (*demand-inflation*).

Penularan inflasi dari luar negeri ke dalam negeri ini jelas lebih mudah terjadi pada negara-negara yang perekonomiannya terbuka, yaitu pada sektor perdagangan luar negerinya penting (seperti Indonesia, Korea, Taiwan, Singapura, Malaysia dan sebagainya). Namun berapa jauh penularan tersebut terjadi juga tergantung pada kebijaksanaan pemerintah yang diambil. Dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan moneter dan perpajakan tertentu pemerintah bisa menetralsir kecenderungan inflasi yang berasal dari luar negeri tersebut.

2.2.2 Inflasi Menurut Sifatnya

Penggolongan **kedua** didasarkan atas “parah” tidaknya inflasi tersebut. Di sini kita bedakan beberapa macam inflasi (Boediono, 1980:98) :

- 1) Inflasi ringan (di bawah 10% setahun)
- 2) Inflasi sedang (antara 10 – 30% setahun)
- 3) Inflasi berat (antara 30 – 100% setahun)
- 4) Hiperinflasi (di atas 100% setahun)

Penentuan parah tidaknya inflasi tentu saja sangat relatif dan tergantung pada “selera” kita untuk menamakannya. Dan lagi sebetulnya kita tidak bisa menentukan parah tidaknya suatu inflasi hanya dari sudut laju inflasi saja, tanpa mempertimbangkan siapa-siapa yang menanggung beban atau yang memperoleh keuntungan dari inflasi tersebut. Kalau seandainya laju inflasi adalah 20% dan

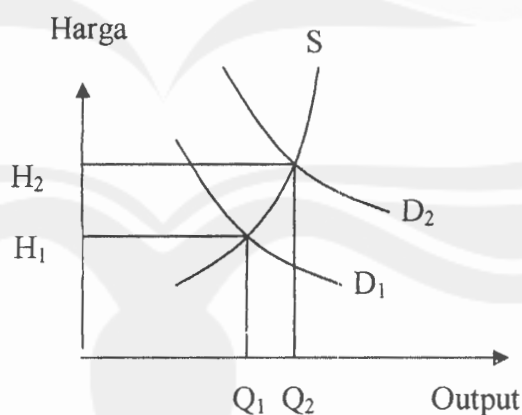
semuanya berasal dari kenaikan harga dari barang-barang yang dibeli oleh golongan yang berpenghasilan rendah, maka seharusnya kita menamakannya inflasi yang parah.

2.2.3 Inflasi Menurut Sebabnya

Penggolongan yang ketiga adalah atas dasar sebab-musabab awal dari inflasi. Atas dasar ini kita bedakan 2 (dua) macam inflasi :

- 1) Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. Inflasi semacam ini disebut *demand inflation*.
- 2) Inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi. Ini disebut *cost inflation*.

Gambar dibawah ini menggarisbawahi perbedaan dari kedua macam inflasi ini :



Gambar 2.1
Demand Inflation

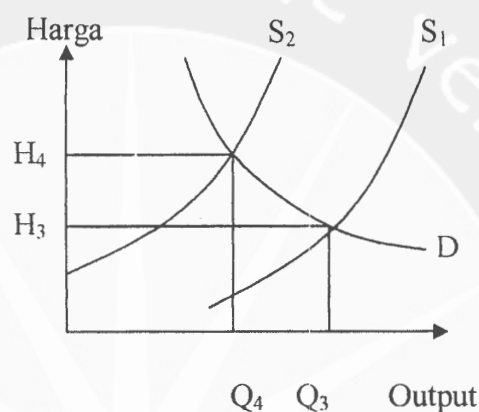
Keterangan:

S = kurva penawaran *aggregate*

D = kurva permintaan *aggregate*

Gambar 2.1 menggambarkan suatu *demand inflation*. Karena permintaan masyarakat akan barang-barang (*aggregate demand*) bertambah (misalnya, karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang,

atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor, atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah), maka kurva *aggregate demand* bergeser dari D_1 ke D_2 . akibatnya, tingkat harga umum naik dari H_1 ke H_2 .



Gambar 2.2

Cost Inflation

Keterangan:

S = kurva penawaran *aggregate*

D = kurva permintaan *aggregate*

Pada gambar 2.2 menggambarkan bahwa bila ongkos produksi naik (misalnya, karena kenaikan harga sarana produksi yang didatangkan dari luar negeri, atau karena kenaikan harga bahan bakar minyak) maka kurva penawaran masyarakat (*aggregate supply*) bergeser dari S_1 ke S_2 .

Akibat dari kedua macam inflasi tersebut, dari segi kenaikan harga *output*, tidak berbeda, tetapi dari segi volume *output* (GDP riil) ada perbedaan. Dalam kasus *demand inflation*, biasanya ada kecenderungan untuk *output* (GDP riil) menaik bersama-sama dengan kenaikan harga umum. Besar kecilnya kenaikan *output* ini tergantung kepada elastisitas kurva *aggregate supply*; biasanya semakin mendekati output maksimum semakin tidak elastis kurva ini. Sebaliknya,

dalam kasus *cost inflation*, biasanya kenaikan harga-harga dibarengi dengan penurunan omzet penjualan barang (“kelesuan usaha”).

Perbedaan yang lain dari kedua proses ini terletak pada urutan dari kenaikan harga. Dalam *demand-inflation* kenaikan harga barang akhir (*output*) mendahului kenaikan harga barang-barang input dan harga-harga faktor produksi (upah dan sebagainya). Sebaliknya, dalam *cost-inflation* kita melihat kenaikan harga barang-barang input dan harga-harga faktor produksi mendahului kenaikan barang-barang akhir (*output*).

2.3 Teori Inflasi

Secara garis besar ada tiga kelompok teori mengenai inflasi, yang masing-masing menyoroti aspek-aspek tertentu dari proses inflasi, yaitu teori kuantitas, teori Keynes, dan teori strukturalis.

2.3.1 Teori Kuantitas

Teori kuantitas mengatakan bahwa proses inflasi terjadi karena dua hal yaitu : jumlah uang beredar dan psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga (*expectation*). Dengan adanya penambahan jumlah uang beredar (JUB) lebih cepat dari perkembangan jumlah produksi maka akan terjadi inflasi, dan apabila tidak ada penambahan jumlah uang beredar maka inflasi akan berhenti dengan sendirinya.

Ada dua pendekatan yang menerangkan terjadinya inflasi yaitu pendekatan persamaan pertukaran dan pendekatan *Cambridge*. Perbedaan kedua pendekatan tersebut pada dasarnya adalah bahwa pendekatan persamaan cenderung

menekankan pada faktor-faktor teknis yang menentukan kecepatan peredaran uang. Sementara itu *Cambridge* menekankan bahwa dengan *stock* uang tertentu, tingkat harga tergantung dari jumlah uang yang dipegang masyarakat.

Menurut pendekatan persamaan pertukaran yang dikembangkan oleh Irving Fisher bahwa proses inflasi dapat diterangkan sebagai berikut :

$$M.V = P.T$$

Dimana :

M = Jumlah uang beredar

V = Kecepatan peredaran uang dalam satu periode

P = Tingkat harga

T = Jumlah transaksi yang terjadi selama periode tertentu

Persamaan diatas berarti bahwa total pengeluaran uang untuk barang dan jasa (*Total money expenditure of goods and services*). Dengan mengasumsikan bahwa kecepatan uang terjadi antara jumlah uang beredar dan tingkat harga, dengan demikian perubahan jumlah uang akan menyebabkan perubahan tingkat harga, sedangkan menurut *Cambridge* sebagai berikut :

$$\frac{M}{P} = P.T$$

Dimana :

M = Jumlah uang beredar

P = Tingkat harga

K = Kecepatan peredaran uang

Y = Pendapatan riil

Dengan asumsi K dan Y tetap dalam jangka pendek, maka suatu kelompok masyarakat cenderung memegang uang yang nilai riilnya sama dengan pendapatan riil mereka. Pendekatan ini menekankan pada motif seseorang dalam mengalokasikan kekayaan dalam bentuk uang (motif transaksi). Selain itu pendekatan ini juga mengasumsikan bahwa permintaan uang ditentukan oleh Y riil, tingkat suku bunga, dan ekspektasi masa mendatang. Dalam kondisi keseimbangan dimana $M_d = KPY$ atau $M_s V = PY$

Dimana :

$$V = \frac{1}{K}$$

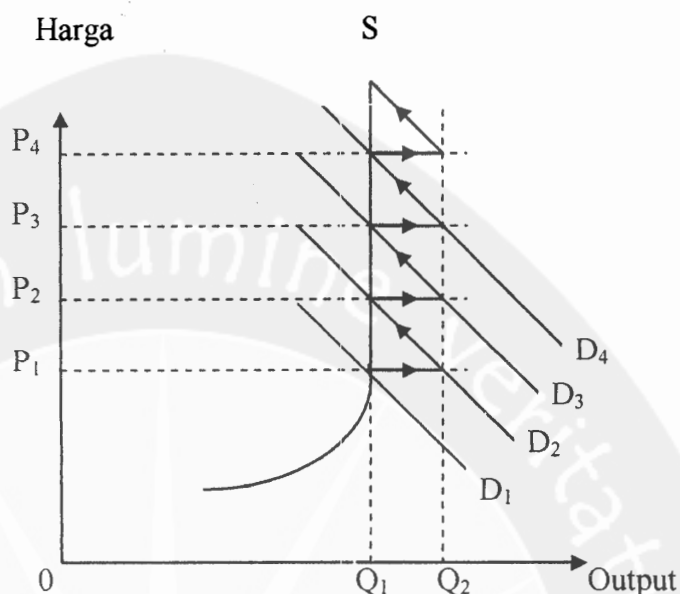
Dalam jangka pendek K dan Y tidak berubah, kondisi ini mencerminkan Y riil dalam perekonomian *full employment* dan cara-cara pembayaran transaksi yang tetap. Dengan demikian tingkat harga tergantung dengan jumlah uang beredar.

2.3.2 Teori Keynes

Mengenai inflasi didasarkan atas teori makronya. Teori ini menyoroti aspek lain dari inflasi. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya. Proses inflasi menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (timbulnya apa yang disebut dengan *inflationary gap*). *Inflationary gap* ini timbul karena golongan-

golongan masyarakat tersebut berhasil menterjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan yang efektif akan barang-barang. Dengan lain perkataan, mereka berhasil memperoleh dana untuk mengubah aspirasinya menjadi rencana pembelian barang-barang yang didukung dengan dana. Golongan masyarakat seperti ini mungkin adalah pemerintah sendiri, yang berusaha memperoleh bagian yang lebih besar dari output masyarakat dengan jalan menjalankan defisit dalam anggaran belanjanya yang dibiayai dengan mencetak uang baru. Golongan tersebut mungkin juga pengusaha-pengusaha swasta yang menginginkan untuk melakukan investasi-investasi baru dan memperoleh dana pembiayaan dari kredit dari bank. Golongan tersebut bisa pula berupa serikat buruh yang berusaha memperoleh kenaikan gaji bagi anggota-anggotanya melebihi kenaikan produktivitas buruh. Bila jumlah dari permintaan-permintaan efektif dari semua golongan masyarakat tersebut, pada harga-harga yang berlaku, melebihi jumlah maksimum dari barang-barang yang bisa dihasilkan oleh masyarakat, maka *inflationary-gap* timbul. Karena permintaan total melebihi jumlah barang yang tersedia, maka harga-harga akan naik (Boediono, 1980:108).

Gambar 2.3 dibawah ini menunjukkan keadaan dimana *inflationary gap* tetap timbul :



Gambar 2.3
Inflationary gap

Keterangan:

S = kurva penawaran *aggregate*

D = kurva permintaan *aggregate*

Kita menganggap bahwa semua golongan masyarakat bisa memperoleh dana yang cukup untuk membiayai, pada harga berlaku, rencana-rencana pembelian mereka. Dengan timbulnya *inflationary gap* (misalnya, pemerintah memperbesar pengeluarannya dengan jalan mencetak uang baru), kurva permintaan efektif bergeser dari D_1 ke D_2 . *Inflationary gap* sebesar Q_1Q_2 timbul dan harga naik dari P_1 ke P_2 . Kenaikan harga ini mengakibatkan rencana-rencana pembelian golongan masyarakat (termasuk pemerintah sendiri) tidak terpenuhi. Karena jumlah barang-barang yang tersedia tidak bisa lebih besar lagi daripada OQ_1 , maka yang terjadi hanyalah realokasi barang-barang yang tersedia dari golongan-golongan masyarakat lain tersebut bisa memperoleh dana untuk membiayai rencana-rencana pembeliannya yang lama dengan harga-harga baru yang lebih tinggi, dan pemerintah tetap pula berusaha memperoleh jumlah barang-

barang seperti yang direncanakan pada periode sebelumnya dengan harga-harga baru yang lebih tinggi, maka *inflationary gap* sebesar Q_1Q_2 akan timbul lagi. Harga akan naik lagi dari P_2 ke P_3 . Kalau setiap golongan masyarakat tetap berusaha memperoleh dana untuk membiayai rencana-rencana tersebut pada tingkat harga yang berlaku, maka *inflationary gap* akan tetap timbul pada periode-periode selanjutnya. Dalam hal ini harga-harga akan terus-menerus menaik. Inflasi akan berhenti hanya bila salah satu golongan masyarakat tidak lagi (atau tidak bisa lagi) memperoleh dana untuk membiayai rencana pembelian barang-barang pada harga yang berlaku, sehingga permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan tidak lagi melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (*inflationary gap* hilang).

2.3.3 Teori Strukturalis

Teori strukturalis adalah teori mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberi tekanan pada ketegaran (*inflexibilities*) dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian (yang, menurut definisi, faktor-faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang), maka teori ini bisa disebut teori inflasi “jangka panjang”. Dengan lain perkataan, yang dicari disini adalah : faktor-faktor jangka panjang manakah yang bisa mengakibatkan inflasi (yang berlangsung lama)? Menurut teori ini, ada 2 (dua) ketegaran utama dalam perekonomian negara-negara sedang berkembang yang bisa menimbulkan inflasi.

- 1) Ketegaran yang pertama berupa “ketidakelastisan” dari penerimaan ekspor, yaitu nilai ekspor yang tumbuh secara lamban dibandingkan dengan pertumbuhan sektor-sektor lain. Kelambanan ini disebabkan karena : (a) Harga di pasar dunia dari barang-barang ekspor negara tersebut makin tidak menguntungkan (dibanding dengan harga barang-barang impor yang harus dibayar), atau sering disebut dengan istilah dasar penukaran (*terms of trade*) yang makin memburuk. Sering dianggap bahwa harga barang-barang hasil alam, yang merupakan ekspor dari negara-negara sedang berkembang, dalam jangka panjang naik lebih lambat daripada harga barang-barang industri, yang merupakan impor oleh negara-negara sedang berkembang. (b) *Supply* produksi barang-barang ekspor yang tidak responsif terhadap kenaikan harga (*supply* barang-barang ekspor yang tidak elastis). Kelambanan pertumbuhan penerimaan ekspor ini berarti kelambanan pertumbuhan kemampuan untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan (untuk konsumsi maupun untuk investasi). Akibatnya, negara tersebut (yang berusaha, sesuai dengan rencana pembangunannya, untuk mencapai target pertumbuhan tertentu) terpaksa mengambil kebijaksanaan pembangunan yang menekankan pada penggalakan produksi dalam negeri dari barang-barang yang sebelumnya diimpor (*import-substitution strategy*), meskipun seringkali produksi dalam negeri ini mempunyai ongkos produksi yang lebih tinggi (dan sering pula dengan kualitas yang lebih rendah) daripada barang-barang yang sejenis yang diimpor. Ongkos produksi yang lebih tinggi ini mengakibatkan harga yang lebih tinggi. Dan bila proses substitusi impor ini makin meluas, kenaikan

ongkos, produksi juga makin meluas ke berbagai barang (yang tadinya diimpor), semakin banyak harga-harga barang yang naik. Dengan demikian inflasi terjadi.

- 2) Ketegaran yang kedua berkaitan dengan “ketidakelastisan” dari *supply* atau produksi bahan makanan di dalam negeri. Dikatakan bahwa produksi bahan makanan dalam negeri tidak tumbuh secepat pertumbuhan penduduk dan penghasilan per kapita, sehingga harga bahan makanan di dalam negeri cenderung untuk menaik melebihi kenaikan harga barang-barang lain. Akibat selanjutnya adalah timbulnya tuntutan dari para karyawan (di sektor industri) untuk memperoleh kenaikan upah/gaji. Kenaikan upah berarti kenaikan ongkos produksi, yang berarti pula kenaikan harga dari barang-barang seterusnya mengakibatkan timbulnya tuntutan kenaikan upah lagi. Kenaikan upah kemudian diikuti oleh kenaikan harga-harga, dan seterusnya. Proses ini akan berhenti dengan sendirinya seandainya harga bahan makanan tidak terus menaik. Tetapi oleh karena faktor struktural tadi, harga bahan makanan akan terus menaik, sehingga proses saling dorong-mendorong atau proses “spiral” antara harga dan upah tersebut terus selalu mendapat “umpan” baru dan tidak berhenti.

Mengenai teori strukturalis ini 3 hal perlu ditekankan :

- 1) Teori ini menerangkan proses inflasi jangka panjang di negara-negara sedang berkembang.
- 2) Dibalik “ceritera inflasi” ala strukturalis ini ada asumsi bahwa jumlah uang yang beredar bertambah dan secara pasif mengikuti dan menampung kenaikan

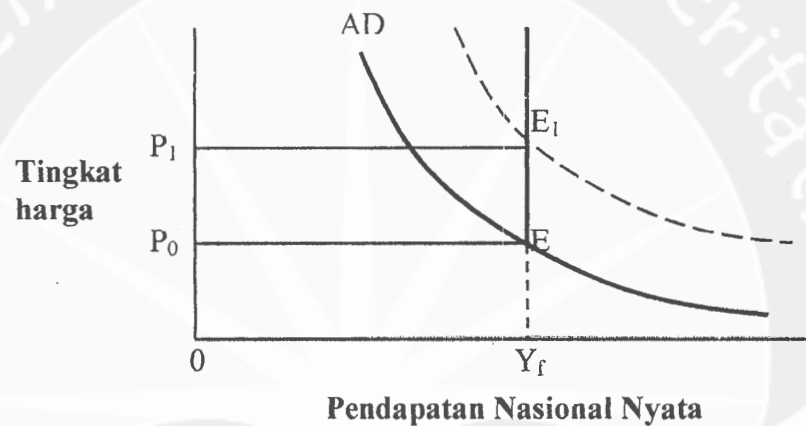
harga-harga tersebut. Dengan lain perkataan, proses inflasi tersebut hanya bisa berlangsung terus dan hanya apabila jumlah uang yang beredar juga bertambah terus. Tanpa kenaikan jumlah uang, proses itu akan berhenti dengan sendirinya. Di sini, dan juga dalam teori inflasi Keynes, ternyata teori kuantitas tetap berlaku, meskipun hanya dibelakang layar.

- 3) Tidak jarang faktor-faktor “struktural” yang dikatakan sebagai sebab-musabab yang paling dasar dari proses inflasi tersebut bukan 100% “struktural”, sering dijumpai bahwa ketegaran-ketegaran tersebut disebabkan oleh kebijaksanaan harga/moneter pemerintah sendiri. Sebagai misal, ketidakmampuan produksi bahan makanan dalam negeri untuk tumbuh mungkin sekali disebabkan oleh penekanan harga bahan makanan di dalam negeri sehingga gairah berproduksi petani menurun. Sering pula dijumpai bahwa ketidakmampuan produksi barang-barang ekspor untuk tumbuh disebabkan karena kurs valuta asing ditekan terlalu rendah dengan maksud untuk menekan inflasi. Seringkali pula ketidakelestarian ini disebabkan oleh adanya pungli-pungli, sehingga harga bahan-bahan ekspor yang betul-betul diterima produsen rendah, dan kurang cukup untuk menggairahkan produksi.

2.3.4 Teori Inflasi Yang Menekan Segi Permintaan

Istilah kolektif untuk semua teori yang menekankan segi permintaan adalah “*Demand – Pull Theory*”. Teori ini menekankan perubahan-perubahan yang terjadi pada tingkat harga dengan bantuan gap (celah) inflasioner dan gap deflasioner. Dikatakan olehnya bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada tingkat harga disebabkan karena adanya perubahan pada permintaan total. Sesuatu

kenaikan dalam permintaan total yang kurang lebih mencapai *Full Employment* akan menyebabkan terjadinya permintaan yang berlebihan pada banyak pasar individual dan harga-harga akan meningkat. Bertambahnya permintaan akan barang-barang dan jasa-jasa akan menyebabkan bertambahnya permintaan akan faktor-faktor produksi dan harga-harga mereka akan meningkat pula ke atas (Winardi, 1995:239).



Gambar 2.4
Inflasi yang Timbul karena
Segi Permintaan (*Demand*
***Side Inflation*)**

Keterangan:

AD = kurva permintaan total

AS = kurva penawaran total

Pertambahan-pertambahan dalam permintaan total dapat menimbulkan gap inflasioner yang kemudian menyebabkan tingkat harga meningkat. Kurva permintaan total semula adalah AD_1 , sedangkan kurva suplai total adalah $P_0 AS$, maka perekonomian yang bersangkutan dalam keadaan keseimbangan pada E, dengan tingkat harga P_0 dan pendapatan nasional berjumlah Y_f . Sesuatu kenaikan dalam permintaan total hingga AD_1 menyebabkan timbulnya sebuah gap

inflasioner. Tingkat harga meningkat hingga P_1 , pada titik mana perekonomian yang bersangkutan berada dalam keseimbangan pada E_1 pada kurva suplai totalnya yang baru yaitu $P_1 AS$.

Semua penganut teori "*Demand – Pull*" (teori yang menekankan "tarikan" permintaan) sepaham bahwa inflasi secara langsung adalah pergeseran-pergeseran yang terjadi pada permintaan total (AD) yang menyebabkan timbulnya gap-gap inflasioner. Tetapi ada pendapat yang berbeda tentang apa yang menyebabkan kurva permintaan total mengalami pergeseran posisi.

Kaum "Moneteris" melihat sebagai sebagai kausa pokok yaitu pertambahan-pertambahan yang terjadi pada suplai uang.

Kaum "Neo-Keynesian" menerima ekspansi moneter sebagai salah satu kausa pokok, tetapi mereka juga berpendapat juga bahwa inflasi karena segi permintaan dapat pula terjadi karena pergeseran-pergeseran pada fungsi konsumsi, fungsi investasi dan fungsi pengeluaran negara, hal mana berarti bahwa suplai uang tidak perlu bertambah.

2.3.5 Teori Inflasi Yang Menekan Segi Penawaran

Teori-teori yang menekankan segi penawaran menganggap bahwa pergeseran-pergeseran yang terjadi pada kurva suplai total merupakan kausa yang menyebabkan timbulnya suatu inflasi (Winardi, 1995:241).

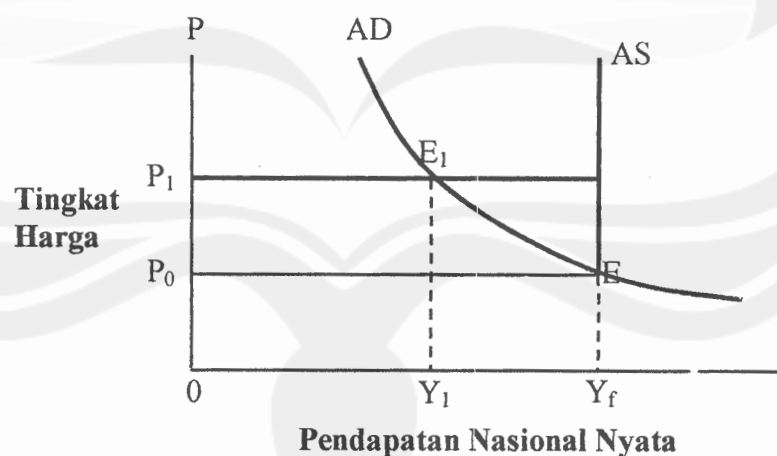
Inflasi-inflasi yang timbul karenanya dinamakan orang:

- *Cost – Push Inflation* (Inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya);
- *Supply – Shock Inflation* (Inflasi karena kejutan suplai).

Sewaktu kurva suplai total bergeser ke atas, maka keseimbangan bergeser ke atas ke bagian kiri kurva permintaan total yang ada. Jadi, tingkat harga meningkat, sedangkan pendapatan nasional nyata menurun seperti pada gambar berikut ini.

Berbagai teori inflasi yang menekankan segi penawaran berbeda satu sama lain, dalam hal asumsi mereka tentang apa yang merupakan kausa pokok pergeseran ke atas pada kurva suplai total:

- Upah;
- Harga-harga domestik;
- Harga-harga barang impor, atau
- Kekakuan-kekakuan struktural.



Gambar 2.5
Inflasi yang Menekankan Segi
Penawaran (*Supply - Side*
***Inflation*)**

Keterangan:

AD = kurva permintaan total

AS = kurva penawaran total

Inflasi yang menekankan segi penawaran menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran ke atas kuva penawaran total: Hal tersebut menyebabkan meningkatnya tingkat harga dan menyebabkan berkurangnya pendapatan nyata. Perekonomian yang bersangkutan berada dalam keadaan keseimbangan dengan kurva permintaan total AD, kurva suplai total P, AS, tingkat harga keseimbangan P_0 dan pendapatan nasional sebesar Y_f . Sesuatu pergeseran ke atas pada kurva penawaran total hingga P_1 AS menyebabkan titik keseimbangan meningkat sampai E_1 . Maka, tingkat harga meningkat hingga P_1 sedangkan pendapatan nasional berkurang hingga Y_1 .

2.4 Efek Inflasi

Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi serta produk nasional. Efek terhadap distribusi pendapatan disebut dengan : *equity effect*, sedang efek terhadap alokasi faktor produksi, dan produk nasional masing-masing disebut dengan *efficiency* dan *output effects* (Nopirin, 1987:32).

2.4.1 Efek Terhadap Pendapatan (*Equity Effect*)

Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi.

Seseorang yang memperoleh pendapatan tetap akan dirugikan oleh adanya inflasi. Misalnya seorang yang memperoleh pendapatan tetap Rp 500.000,00 per tahun sedang laju inflasi sebesar 10%, akan menderita kerugian penurunan pendapatan riil sebesar laju inflasi tersebut, yakni Rp 50.000,00.

Demikian juga orang yang menumpuk kekayaan dalam bentuk uang kas akan menderita kerugian karena adanya inflasi. Contoh lain uang kas akan menderita kerugian karena adanya inflasi. Contoh lain, yang dirugikan karena adanya inflasi adalah orang/pihak yang memberikan pinjaman uang dengan bunga lebih rendah dari laju inflasi. Misalnya, dia memberi pinjaman Rp 10.000,00 dengan bunga 10% per tahun. Apabila laju inflasi sebesar 15% per tahun, maka sebenarnya nilai riil pinjamannya akan menjadi lebih rendah.

Sebaliknya, pihak-pihak yang mendapat keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan prosentasi yang lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang dimana nilainya naik dengan prosentase lebih besar daripada laju inflasi. Adanya serikat buruh yang kuat kadangkala berhasil dalam menuntut kenaikan upah dengan prosentase yang lebih besar daripada laju inflasi. Dengan demikian inflasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola pembagian pendapatan dan kekayaan masyarakat. Inflasi seolah-olah merupakan pajak bagi seseorang dan merupakan subsidi bagi orang lain.

2.4.2 Efek Terhadap Efisiensi (*Efficiency Effect*)

Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Dengan adanya inflasi permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain, yang kemudian mendorong kenaikan produksi barang tersebut. Kenaikan produksi barang ini pada gilirannya

akan merubah pola alokasi faktor produksi yang sudah ada. Memang tidak ada jaminan bahwa alokasi faktor produksi itu lebih efisien dalam keadaan tidak ada inflasi. Namun, kebanyakan ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi dapat mengakibatkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisiensi.

2.4.3 Efek Terhadap Output (*Output Effect*)

Dalam menganalisa kedua efek di atas (*equity* dan *efficiency effects*) digunakan suatu anggapan bahwa output tetap. Hal ini dilakukan agar supaya dapat diketahui efek inflasi terhadap distribusi pendapatan dan efisiensi dari jumlah output tertentu tersebut. Ibaratnya, “kue pembangunan” sudah tertentu besarnya, pertanyaannya bagaimana efek inflasi terhadap pembagian kue tersebut (*equity effects*) serta efisiensi penggunaan/alokasi faktor produksi untuk menghasilkan kue tersebut.

Lain halnya dengan *output effect*, yang mempertanyakan bagaimana efek inflasi terhadap besarnya kue. Artinya, apakah inflasi akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan output.

Inflasi mungkin dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Alasannya dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Namun apabila laju inflasi ini cukup tinggi (*hyper inflation*) dapat mempunyai akibat sebaliknya, yakni penurunan output. Dalam keadaan inflasi tinggi, nilai uang riil turun dengan drastis, masyarakat cenderung tidak menyukai uang kas, transaksi ke arah barter, yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi barang. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa tidak ada hubungan langsung antara inflasi dengan output. Inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan output, tetapi bisa juga dibarengi dengan penurunan output.

Intensitas efek inflasi ini berbeda-beda, tergantung apakah dibarengi dengan kenaikan produksi dan *employment* atau tidak. Apabila produksi barang ikut naik, maka kenaikan produksi ini sedikit banyak dapat mengerem laju inflasi. Tetapi, apabila ekonomi mendekati kesempatan kerja penuh (*full-employment*) intensitas efek inflasi makin besar. Inflasi dalam keadaan kesempatan kerja penuh ini sering disebut dengan inflasi murni (*pure inflation*).

2.5 Hubungan Antara Inflasi dengan Jumlah Uang Beredar

Pengertian jumlah uang beredar adalah penjumlahan dari uang kartal dan uang giral yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat. Uang kartal adalah uang tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral yang langsung di bawah kekuasaan masyarakat umum untuk digunakan. Uang kertas atau uang logam oleh pemerintah atau bank sentral yang disimpan dalam lemari besi bank-bank atau di bank sentral sendiri tidak termasuk “uang kartal”.

Uang giral adalah seluruh nilai saldo rekening Koran (giro) yang dimiliki masyarakat pada bank-bank umum. Saldo ini merupakan bagian dari uang yang beredar karena sewaktu-waktu bisa digunakan oleh pemiliknya (masyarakat) untuk kebutuhannya (transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi), persis seperti uang kartal. Saldo rekening Koran (giro) milik suatu bank pada bank lain bukan uang giral.

Jumlah uang beredar pada suatu saat adalah penjumlahan dari uang kartal dan uang giral.

$$M_s = K + D$$

Di mana :

M_s : Jumlah uang beredar

K : uang kartal (*Currency*)

D : uang giral (*Demand deposit*).

Pengertian lain mengenai jumlah uang beredar didasarkan atas anggapan bahwa sebenarnya bukan hanya uang tunai dan saldo giro (cek) saja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Uang milik masyarakat yang disimpan di bank dalam bentuk deposito berjangka (*time deposit*) atau tabungan juga mempunyai ciri yang mendekati uang tunai. Deposito berjangka dapat diambil sewaktu-waktu oleh pemiliknya meskipun dengan kehilangan bunga karena belum jatuh tempo untuk pengambilan.

Peran dari penciptaan uang sangat berpengaruh dalam kondisi perekonomian suatu negara. Pemerintah dalam menekan laju inflasi melalui kebijakan moneter sangat menitikberatkan pada pengendalian jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau bank sentral untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui pasar uang. Secara khusus definisi kebijakan moneter bisa diartikan sebagai tindakan makro pemerintah (bank sentral) dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang.

Keputusan pemerintah dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, maka dapat mempengaruhi jumlah uang beredar. Usaha pemerintah dengan

mempengaruhi jumlah uang beredar dapat mempengaruhi tingkat suku bunga yang berlaku di pasar uang. Melalui tingkat bunga pemerintah dapat mempengaruhi pengeluaran investasi (I), selanjutnya permintaan agregat (Z), dan akhirnya tingkat harga (P) serta GDP riil (Q). Dengan demikian apabila pemerintah melakukan pengendalian inflasi melalui jumlah uang beredar, maka laju inflasi dapat ditekan atau dikendalikan.

2.6 Hubungan Antara Inflasi dengan Produk Domestik Bruto Riil

Kemungkinan kelebihan produksi. Keynes menolak Hukum Say. Menurut Keynes kelebihan produksi secara umum bisa terjadi (Boediono, 1982:33). Kelebihan permintaan ini terjadi bila permintaan masyarakat akan barang-barang/jasa tidak cukup kuat. *Demand* yang ada tidak cukup untuk menyerap *supply* yang ditawarkan. Bagaimana ini terjadi? Pada dasarnya Keynes masih menerima pendapat Say bahwa setiap proses produksi mempunyai akibat ganda, yaitu menghasilkan *output* dan menghasilkan penghasilan kepada masyarakat sebesar nilai *output* tersebut. Dengan demikian pada suatu waktu tertentu daya beli memang tersedia dalam jumlah yang cukup di masyarakat untuk “membeli” barang/jasa yang diproduksi. Tetapi daya beli yang dimiliki oleh masyarakat tersebut tidak harus sama dengan daya beli yang betul-betul diterjemahkan menjadi permintaan efektif di pasar barang. Tetapi sebagian dari daya beli tersebut mungkin akan ditabung oleh masyarakat. Menabung tidak menambah permintaan efektif di pasar barang. Jadi tidak seluruh penghasilan (daya beli) yang diperoleh masyarakat secara langsung diterjemahkan menjadi permintaan efektif.

Pendapat Keynes akan diterangkan secara lebih jelas maka kita anggap hanya ada dua sektor: sektor rumah-tangga dan sektor produsen. Keynes mengatakan bahwa sebagian besar dari penghasilan yang tidak dibelanjakan oleh sektor rumah-tangga (yaitu yang ditabung pada lembaga-lembaga keuangan) tidak menimbulkan permintaan efektif. Hanya apabila daya beli yang ditabung tersebut dipinjamkan oleh lembaga keuangan kepada sektor produsen untuk membiayai "investasi" mereka, maka daya beli tersebut berubah menjadi permintaan efektif di pasar barang. Jadi jelas bahwa pada suatu waktu tidak ada jaminan bahwa seluruh daya beli yang ditabung tersebut akan diterjemahkan menjadi permintaan efektif di pasar barang. Semua ini tergantung kepada apakah para produsen mau mempergunakan daya beli yang ditabung kepada lembaga-lembaga keuangan tersebut untuk pembelian barang-barang (investasi).

Seandainya pengeluaran investasi yang diinginkan para produsen (investor) ternyata lebih besar daripada dana yang ditabung oleh sektor rumah-tangga, maka ini berarti bahwa permintaan efektif lebih besar daripada nilai output yang tersedia. Dalam kasus kelebihan permintaan efektif ini, berapa besar kelebihan permintaan efektif dalam periode sekarang akan mengakibatkan kenaikan GDP dan berapa besar akan mengakibatkan kenaikan harga, tergantung pada tersedianya kapasitas produksi yang belum terpakai dalam masyarakat. Bila masih cukup banyak kapasitas produksi (pabrik-pabrik) yang belum bekerja secara penuh, maka kelebihan permintaan efektif tersebut akan mengakibatkan kenaikan produksi (GDP) pada periode berikutnya tanpa menaikkan harga-harga (atau harga-harga mungkin naik sedikit sekali). Tetapi apabila ternyata bahwa pabrik-

pabrik sudah bekerja secara penuh, maka kelebihan produksi (GDP), sehingga kelebihan permintaan tersebut akan diterjemahkan seluruhnya menjadi kenaikan harga-harga atau inflasi.

